



## Pendekatan Hibrida dalam Menghadapi Dilema Globalisasi dan Autarki di Sektor Pertahanan Indonesia

Ledy Seftiana<sup>1\*</sup>, Ivan Yulivan<sup>2</sup>, Djoko Andreas Navalino<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pertahanan RI, Indonesia

Alamat: Kampus Universitas Pertahanan RI, Jalan Salemba Raya Nomor 14, Kenari Kec. Senen  
Jakarta Pusat 10440, Jakarta Pusat

Korespondensi penulis: [ledyseftiana@gmail.com](mailto:ledyseftiana@gmail.com)\*

**Abstract.** *This research explores the tension between globalisation and autarky in Indonesia's defence sector and its implications for national security. Using a qualitative case study approach, this research analyses three main events: US arms embargo, Minimum Essential Force (MEF) policy, and KFX/IFX project. The study integrates the theories of Economic Security, Defence Diplomacy, Realism, Complex Interdependence and National Security to evaluate the impact of global dependence and strategic independence. The results show that a hybrid approach, which integrates the advantages of globalisation and autarky, is the optimal solution for Indonesia to strengthen national security and maintain strategic autonomy amid global geopolitical challenges.*

**Keywords:** *Autarchy, Globalisation, National Security, Hybrid Approach, Defence Strategy*

**Abstrak.** Penelitian ini mengeksplorasi ketegangan antara globalisasi dan autarki di sektor pertahanan Indonesia serta implikasinya terhadap keamanan nasional. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini menganalisis tiga peristiwa utama: embargo senjata AS, kebijakan Minimum Essential Force (MEF), dan proyek KFX/IFX. Studi ini memadukan teori Economic Security, Diplomasi Pertahanan, Realisme, Interdependensi Kompleks, dan Ketahanan Nasional untuk mengevaluasi dampak ketergantungan global dan kemandirian strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hibrida, yang mengintegrasikan keunggulan globalisasi dan autarki, merupakan solusi optimal bagi Indonesia untuk memperkuat keamanan nasional dan mempertahankan otonomi strategis di tengah tantangan geopolitik global..

**Kata kunci:** Autarki, Globalisasi, Keamanan Nasional, Pendekatan Hibrida, Strategi Pertahanan

### 1. LATAR BELAKANG

Pasar pertahanan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman geopolitik dan dinamika global yang terus berubah. Globalisasi memberikan peluang kolaborasi internasional, memungkinkan negara-negara mengakses teknologi canggih melalui rantai pasokan global, serta mendorong efisiensi produksi. Namun, pendekatan ini sering kali meningkatkan risiko ketergantungan terhadap negara mitra, yang dapat mengancam otonomi strategis suatu negara (Ezeja, 2024; Kurç, 2017).

Sebaliknya, autarki menekankan kemandirian strategis melalui pengembangan industri domestik untuk memastikan keamanan pasokan dan stabilitas nasional. Pendekatan ini memberi keuntungan berupa kontrol penuh atas sumber daya dan pengadaan pertahanan,

meskipun menghadapi tantangan biaya tinggi dan efisiensi rendah (Ezeja, 2024; Maculewicz, 2018).

Negara seperti Amerika Serikat telah menunjukkan komitmen pada autarki di sektor pertahanan dengan tetap memprioritaskan produksi domestik, meski menjadi pendukung utama globalisasi di sektor lain (Maye, 2017).

Di sektor pertahanan, globalisasi dan autarki menciptakan dilema bagi negara berkembang seperti Indonesia. Globalisasi mendorong interdependensi antarnegara, yang memperkuat kerja sama multinasional tetapi juga meningkatkan risiko strategis akibat ketergantungan pada impor senjata (Maculewicz, 2018; Purwanto, 2022). Sementara itu, autarki memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat industri pertahanan domestik melalui kebijakan seperti Minimum Essential Force (MEF), tetapi keterbatasan teknologi dan sumber daya menjadi kendala utama dalam mencapai kemandirian sepenuhnya.

Sebagai negara kepulauan yang strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan kedua pendekatan ini. Proyek seperti kerja sama KFX/IFX dengan Korea Selatan menunjukkan bagaimana globalisasi dapat mendorong transfer teknologi yang memperkuat kapasitas domestik. Namun, ketergantungan pada impor senjata juga meningkatkan risiko kerentanan strategis (Pattisina, 2024).

Selain itu, interkoneksi ekonomi global membawa dampak signifikan terhadap stabilitas nasional. Ketergantungan pada ekspor sumber daya alam dan impor teknologi menciptakan risiko guncangan ekonomi yang dapat melemahkan daya tahan nasional (Asmoro et al., 2022a; Ezeja, 2024). Dimensi keamanan nasional Indonesia kini mencakup tantangan yang lebih luas, termasuk ancaman non-tradisional yang memerlukan pendekatan keamanan yang holistik dan adaptif.

Untuk menghadapi dilema ini, Indonesia perlu mengadopsi strategi keamanan nasional yang mengintegrasikan manfaat globalisasi dan autarki. Dengan mengembangkan pendekatan hibrida, Indonesia dapat memperkuat kapasitas domestik di sektor strategis sambil memanfaatkan peluang kerja sama internasional untuk teknologi non-kritis. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pendekatan optimal untuk Indonesia dalam konteks modernisasi pertahanan dan tantangan geopolitik, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Economic Security Theory**

Dalam *Peace and War: Armed Conflicts and International Order 1648-1989*, Kalevi J. Holsti menjelaskan bahwa ketergantungan ekonomi antarnegara industri dapat mengurangi risiko konflik bersenjata. Hubungan ekonomi yang erat menciptakan biaya tinggi untuk berperang, sehingga mendorong kolaborasi internasional, sesuai teori liberalisme yang mengedepankan stabilitas melalui hubungan antarnegara. Namun, ketimpangan ekonomi baik di tingkat domestik maupun internasional sering menjadi penyebab utama ketegangan, yang berpotensi meningkat menjadi konflik.

Holsti juga menggarisbawahi bahwa ketidakadilan distribusi kekayaan dan akses ke sumber daya strategis seperti minyak dan mineral dapat memicu konflik, khususnya di negara-negara berkembang. Krisis ekonomi dan kelangkaan sumber daya sering memaksa negara untuk mempertahankan stabilitas domestik atau melindungi akses ke sumber daya tersebut. Dalam penelitian ini, teori Holsti digunakan untuk memahami bagaimana pengaturan ekonomi pascakonflik dan perjanjian perdamaian memengaruhi stabilitas internasional. Selain itu, teori ini juga relevan untuk menganalisis bagaimana ketimpangan ekonomi global terus memengaruhi dinamika konflik kontemporer (Holsti, 1991).

### **Teori Diplomasi Pertahanan**

Menurut *Reshaping Defence Diplomacy* oleh Andrew Cottey dan Anthony Forster (2004), diplomasi pertahanan bertujuan tidak hanya untuk mencegah konflik, memperkuat keamanan kolektif, mengurangi ketegangan, dan mempererat hubungan antarnegara. Pendekatan ini menggunakan kerja sama militer sebagai alat diplomasi, seperti latihan bersama, pelatihan, transfer teknologi, dan reformasi militer. Selain meningkatkan kapabilitas militer, diplomasi pertahanan juga membangun kepercayaan melalui hubungan saling menguntungkan.

Dalam konteks Indonesia, diplomasi pertahanan diterapkan dalam proyek strategis seperti KFX/IFX bersama Korea Selatan. Proyek ini mencerminkan upaya Indonesia memanfaatkan kerja sama internasional untuk mendapatkan teknologi pertahanan canggih sambil menjaga kendali atas pengembangan industrinya. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat memperkuat kapasitas domestik tanpa terlalu bergantung pada negara mitra (Cottey & Forster, 2004).

## **Teori Realisme dan Interdependensi Kompleks**

Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye dalam *Power and Interdependence* (2012) menawarkan dua perspektif utama dalam hubungan internasional: Realisme dan Complex Interdependence. Realisme menekankan pentingnya kekuatan militer dan kedaulatan untuk menjaga keamanan nasional, dengan fokus pada kompetisi dan keseimbangan kekuasaan. Sebaliknya, *Complex Interdependence* menunjukkan bahwa ketergantungan multidimensi, termasuk ekonomi, sosial, dan teknologi, mengurangi potensi konflik dan meningkatkan peran diplomasi serta kerja sama internasional.

Indonesia mengadopsi pendekatan hibrida dengan menggabungkan elemen Realisme (kemandirian strategis) dan Complex Interdependence (kerja sama internasional). Contohnya adalah proyek KFX/IFX, di mana Indonesia mendapatkan teknologi maju tanpa mengorbankan otonomi strategis. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menjaga kemandirian sembari memanfaatkan peluang global, terutama dalam sektor pertahanan yang bergantung pada teknologi asing (Keohane & Nye, 2012).

## **Teori Ketahanan Nasional**

Teori ketahanan nasional menekankan kemampuan negara untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari ancaman yang dapat memengaruhi stabilitas. Olga Reznikova dalam *National Resilience in a Changing Security Environment* menyebutkan bahwa ketahanan nasional melibatkan dimensi ekonomi, sosial, politik, dan militer yang saling terintegrasi untuk menghadapi ancaman terhadap stabilitas negara.

Di Indonesia, teori ini tercermin dalam keseimbangan antara globalisasi dan autarki. Globalisasi membuka peluang kolaborasi internasional, seperti proyek KFX/IFX untuk akses teknologi canggih, sementara autarki mendukung kemandirian melalui penguatan industri pertahanan domestik.

Pendekatan hibrida memungkinkan Indonesia mengelola ketergantungan global sekaligus memperkuat pertahanan nasional, menciptakan strategi adaptif yang relevan untuk menjaga kedaulatan di tengah tantangan global.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif untuk menganalisis secara mendalam dinamika antara globalisasi dan autarki dalam sektor pertahanan Indonesia serta implikasinya terhadap keamanan nasional. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis rinci terhadap fenomena kompleks dalam konteks kehidupan nyata, termasuk persepsi dan pandangan aktor yang terlibat (Creswell, 2007).

Studi ini berfokus pada tiga kasus utama yang mencerminkan dinamika antara globalisasi dan autarki. Kasus pertama adalah dampak embargo senjata Amerika Serikat pada 1990-an, yang menghambat modernisasi militer Indonesia dan memaksa negara untuk mengadopsi kebijakan yang mengurangi ketergantungan pada impor senjata. Kasus kedua adalah implementasi kebijakan Minimum Essential Force (MEF), sebuah strategi untuk meningkatkan kapasitas domestik dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) demi mengurangi ketergantungan pada negara lain. Kasus terakhir adalah proyek KFX/IFX, kerja sama strategis Indonesia dengan Korea Selatan dalam pengembangan jet tempur generasi baru, yang bertujuan memperoleh transfer teknologi canggih sekaligus memperkuat industri pertahanan domestik.

Hasil analisis dari ketiga kasus tersebut dikombinasikan dengan teori-teori seperti Economic Security, Diplomasi Pertahanan, Realisme, Interdependensi Kompleks, dan Ketahanan Nasional. Integrasi teori dan studi kasus ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana Indonesia mengelola ketergantungan global sambil memperkuat kemandirian strategis di sektor pertahanan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan ketahanan nasional Indonesia di tengah tantangan geopolitik yang semakin kompleks.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengembangan Kapabilitas Pertahanan Indonesia: Dari Embargo hingga Kerja Sama Internasional**

###### **1. Embargo Senjata AS dan Dampaknya terhadap Modernisasi Militer Indonesia**

Pada 1990-an, embargo senjata AS menjadi tantangan besar bagi modernisasi militer Indonesia, sebagai respons terhadap pelanggaran HAM, termasuk Pembantaian Santa Cruz di Timor Timur. Embargo ini menghalangi akses teknologi militer canggih dan pelatihan internasional seperti IMET, memaksa Indonesia mencari alternatif dari negara seperti Rusia dan China, meski membawa tantangan baru (Inkiriwang, 2020; "U.S. Lifts Arms Embargo against Indonesia," 2005).

Dampak Embargo ini memiliki dampak yang mendalam terhadap kemampuan pertahanan Indonesia:

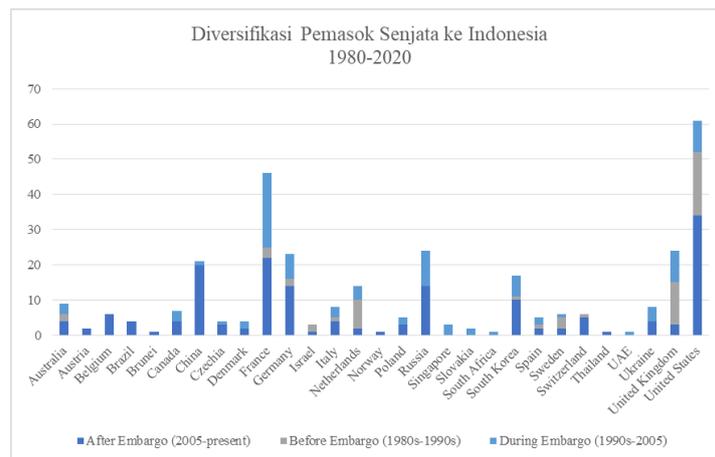
- a) Akses Terbatas ke Teknologi: Pembatasan ini menghalangi Indonesia untuk memperoleh peralatan militer modern dari AS, yang sebelumnya menjadi pemasok utama. Situasi ini memaksa Indonesia untuk mencari alternatif dari negara-negara seperti Rusia, China, serta negara-negara Eropa. Namun, hubungan baru ini sering kali membawa tantangan

tersendiri, termasuk tingkat kemajuan teknologi dan dukungan yang bervariasi (Inkiriwang, 2020; Morrissey, 2006).

- b) **Meningkatnya Kerentanannya:** Ketergantungan Indonesia pada impor pertahanan asing menciptakan kerentanannya, baik secara teknis maupun diplomatis. Ketidakmampuan untuk mengakses teknologi militer AS menghambat kemampuan Indonesia untuk mempertahankan kekuatan militer yang modern dan efektif, yang mampu merespons ancaman regional seperti terorisme dan masalah keamanan maritim (Morrissey, 2006; “U.S. Lifts Arms Embargo against Indonesia,” 2005).
- c) **Peralihan Menuju Produksi Domestik:** Menyadari risiko yang terkait dengan ketergantungan pada asing, Indonesia mulai memprioritaskan pengembangan industri pertahanan domestik. Pergeseran strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dalam produksi pertahanan dan mengurangi kerentanannya terhadap rantai pasokan senjata internasional. Pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manufaktur lokal dalam pembuatan peralatan militer (Inkiriwang, 2020; Nugroho, 2021).

Embargo dicabut pada 2005 oleh Presiden George W. Bush untuk memperkuat kerja sama kontra-terorisme, menandai titik balik penting bagi modernisasi militer Indonesia. Namun, hubungan ini disertai skeptisisme terkait pelanggaran HAM di masa lalu (Morrissey, 2006). Embargo ini mengajarkan pentingnya kemandirian pertahanan dan diversifikasi kemitraan internasional (Morrissey, 2006).

**Grafik 1. Diversifikasi Pemasok Senjata ke Indonesia**



Sumber: SIPRI Arms Transfers Database, Trade Register (1980–2020), diolah oleh penulis.

Embargo senjata AS memberikan dampak yang mendalam terhadap pendekatan Indonesia dalam modernisasi militer pada periode 1990-an dan awal 2000-an. Embargo ini memicu penilaian ulang yang kritis terhadap strategi pertahanan yang menekankan

kemandirian dan kemampuan produksi domestik, sambil juga memacu diversifikasi kemitraan pertahanan dengan menggandeng mitra baru seperti Rusia, Ukraina, dan China (Ali, 2024; Ramadhan Sabana et al., 2023). Seiring Indonesia terus menavigasi lanskap pertahanannya pasca-embargo dengan memperluas daftar mitra internasionalnya, termasuk Korea Selatan, China, dan Perancis. Diversifikasi ini memberikan akses yang lebih luas terhadap teknologi militer canggih sekaligus mempertahankan fleksibilitas strategis, pelajaran yang dipetik selama periode ini tetap relevan dalam membentuk kebijakan militer dan kolaborasi internasional di masa depan (Ali, 2024; “Military Embargo on Indonesia No Longer in Force: US Official,” 2018).

## **2. Kebijakan Minimum Essential Force (MEF): Meningkatkan Kapasitas Domestik**

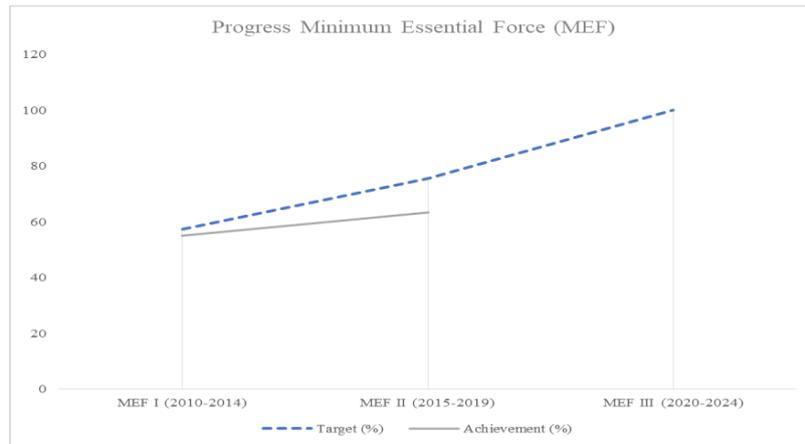
MEF adalah strategi pertahanan nasional Indonesia yang bertujuan membangun postur pertahanan optimal untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Program ini dirancang memenuhi kebutuhan minimum pertahanan tanpa memicu perlombaan senjata internasional, serta mendorong kemandirian industri pertahanan melalui peningkatan produksi Alutsista domestik (Andalus & Djuyandi, 2023; Ramadhoni et al., 2024).

Dimulai pada 2009, MEF terbagi dalam tiga fase yang fokus pada rematerialisasi, pengadaan, revitalisasi, dan relokasi Alutsista. Hingga akhir fase II pada 2019, pencapaian mencapai 72%, dengan target 100% pada 2024. Kebijakan ini menitikberatkan area strategis dengan potensi ancaman tinggi sebagaimana dinyatakan dalam White Paper Pertahanan 2018 (PT. PAL Indonesia, 2022; Ramadhoni et al., 2024).

Industri pertahanan domestik menjadi elemen utama MEF. Perusahaan seperti PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia memainkan peran penting dalam pengembangan Alutsista, termasuk produksi fregat Iver Huitfeldt melalui transfer teknologi (ToT). Selain itu, kerja sama internasional dengan negara seperti Amerika Serikat diharapkan mempercepat penguasaan teknologi canggih oleh industri pertahanan domestik, meskipun membutuhkan negosiasi yang menguntungkan pihak Indonesia (Andalus & Djuyandi, 2023; PT. PAL Indonesia, 2022)(Putra et al., 2023).

MEF adalah langkah strategis untuk memperkuat pertahanan nasional Indonesia dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi pemerintah, investasi dalam teknologi domestik, dan sinergi dengan kerja sama internasional.

**Grafik 2. Progress Minimum Essential Force (MEF)**



Sumber: Kementerian Pertahanan, dikutip dari Aulia Fitri (2023), *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XV, No. 24/II/Pusaka, diolah oleh penulis.

### **3. Proyek KFX/IFX, Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan dalam Pengembangan Jet Tempur dari Pengalaman Transfer Teknologi dan Ketergantungan**

Diplomasi pertahanan Indonesia secara signifikan diilustrasikan melalui kolaborasinya dengan Korea Selatan dalam proyek pengembangan jet tempur multiperan KFX/IFX. Kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan dalam proyek KFX/IFX menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan militer dan memperoleh transfer teknologi. Proyek ini, dengan nilai Rp100 triliun, membagi tanggung jawab finansial di mana Indonesia menanggung 20% dan Korea Selatan 80%. Sebagai hasilnya, Indonesia akan memproduksi 48 unit jet tempur IF-X, sementara Korea Selatan memproduksi 120 unit KF-21 Boramae (Pramudyani, 2023; “RI Komitmen Lanjut Kerja Sama Proyek Jet Tempur KF-21 Dengan Korsel,” 2024).

Transfer teknologi dalam proyek ini memungkinkan PT Dirgantara Indonesia terlibat dalam produksi komponen utama seperti sayap dan ekor pesawat. Hal ini memperkuat kapasitas manufaktur domestik dan mengurangi ketergantungan pada pasokan asing. Selain itu, teknologi canggih yang diperoleh mendorong inovasi dalam desain dan pengembangan produk pertahanan lainnya, meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global (Pattisina, 2024)(Pramudyani, 2023).

Proyek KF-21/IF-X, hasil kerja sama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan, sebelumnya sempat menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal pembiayaan. Indonesia, yang bertanggung jawab atas 20% total biaya proyek, telah mengalami keterlambatan pembayaran yang menghambat kelancaran implementasi proyek. Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan Rp1,25 triliun untuk proyek ini, namun jumlah tersebut belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban yang tertunda. Kendala ini menjadi

perhatian utama kedua negara, yang terus melakukan negosiasi intensif untuk memastikan keberlanjutan proyek tanpa mengurangi kualitas maupun skala pengembangannya (Pramudyani, 2023; “RI Komitmen Lanjut Kerja Sama Proyek Jet Tempur KF-21 Dengan Korsel,” 2024).

Meski menghadapi berbagai kendala, pemerintah Indonesia tetap menunjukkan komitmen tinggi terhadap keberlanjutan proyek ini. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan bahwa kerja sama ini harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak boleh dilakukan dengan langkah ragu-ragu. Ia menekankan bahwa proyek KF-21/IF-X bukan hanya sebuah program teknis, tetapi juga simbol penting dari kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Hal ini menunjukkan pentingnya keberlanjutan proyek ini dalam mendukung penguasaan teknologi pertahanan canggih oleh Indonesia serta memperkuat kapasitas industri pertahanan domestik (CNN Indonesia, 2024; KSP, 2024).

Proyek KFX/IFX memperlihatkan bagaimana diplomasi pertahanan dapat mendukung kemandirian militer sambil memperkuat kerja sama internasional. Dengan proyek ini, Keterlibatan PT Dirgantara Indonesia dalam proyek KF-21/IF-X mencerminkan upaya konkret dalam mendukung transfer teknologi dan memperkuat industri pertahanan domestik, sehingga tidak hanya meningkatkan kapasitas militernya, tetapi juga memperkuat posisinya di kawasan Asia Tenggara sebagai negara dengan industri pertahanan yang semakin mandiri dan berdaya saing. Tantangan finansial yang ada diharapkan dapat diselesaikan untuk memastikan keberhasilan proyek ini, yang memiliki manfaat strategis jangka panjang bagi stabilitas regional dan posisi geopolitik Indonesia (CNN Indonesia, 2024; Kim, 2023; KSP, 2024).

### **Pendekatan Hibrida: Globalisasi dan Autarki dalam Sektor Pertahanan Indonesia**

Pendekatan hibrida yang mengintegrasikan globalisasi dan autarki adalah solusi strategis bagi Indonesia dalam membangun sektor pertahanan yang kuat. Strategi ini memastikan keseimbangan antara kemandirian domestik dan kolaborasi internasional untuk menjaga kedaulatan nasional serta memanfaatkan hubungan antarnegara (Akbarani & Reviani, 2024; Ismail & Priyanto, 2023; Manurung et al., 2023).

Kemampuan memproduksi dan mengembangkan sistem pertahanan strategis secara mandiri sangat penting, terutama bagi Indonesia yang memiliki posisi geopolitik strategis. Investasi dalam R&D untuk persenjataan dan penguatan industri pertahanan domestik berkontribusi pada stabilitas nasional (Herindra, 2022; Nugraha et al., 2024).

Ketergantungan antarnegara dalam ekonomi, teknologi, dan diplomasi membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh teknologi canggih. Kolaborasi internasional, seperti proyek KFX/IFX, menjadi alat penting untuk mempercepat transfer teknologi dan inovasi yang sulit dicapai secara mandiri (Herindra, 2022; Ismail & Priyanto, 2023).

Pendekatan ini memungkinkan Indonesia memperkuat kapasitas domestik sambil mempercepat kemajuan teknologi melalui kerja sama internasional. Dengan mitra yang dipilih secara selektif, Indonesia dapat mengakses teknologi militer, perangkat lunak, dan logistik untuk meningkatkan efisiensi operasional (Karim et al., 2023; Nugraha et al., 2024).



**Gambar 1. Model Konseptual Pendekatan Hibrida**

Sumber: Diadaptasi dari Keohane & Nye (2012) dan Holsti (1991), dengan modifikasi berdasarkan penelitian ini, diolah oleh penulis.

### **Strategi Implementasi Pendekatan Hibrida**

Untuk mencapai keseimbangan optimal antara kemandirian dan keterbukaan, pendekatan ini memerlukan langkah-langkah strategis yang jelas. Beberapa langkah utama yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1. Penguatan Infrastruktur Riset dan Pengembangan (R&D):** Investasi dalam pembangunan pusat riset militer dan teknologi strategis domestik guna menciptakan inovasi yang dapat diandalkan (Akbarani & Reviani, 2024; Herindra, 2022).
- 2. Pemberian Insentif untuk Industri Lokal:** Insentif pajak dan kebijakan protektif diperlukan untuk memastikan bahwa industri pertahanan lokal memiliki daya saing yang kuat di tengah persaingan global (Akbarani & Reviani, 2024).

**3. Kemitraan dengan Institusi Pendidikan dan Penelitian:** Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian domestik dapat mempercepat pengembangan kapasitas teknologi local (Herindra, 2022; Nugraha et al., 2024).

Langkah berikutnya adalah menjalin kerja sama internasional yang selektif untuk mendapatkan teknologi yang tidak dapat dihasilkan secara domestik tanpa mengorbankan kepentingan strategis (Herindra, 2022; Manurung et al., 2023). Proyek seperti KFX/IFX harus dijadikan model untuk memastikan bahwa setiap kerja sama mencakup transfer teknologi yang signifikan serta peluang pengembangan kapasitas local (Herindra, 2022).

Pendekatan hibrida memberikan kerangka kerja adaptif yang mendukung stabilitas keamanan nasional dan meningkatkan daya saing global. Dengan perencanaan yang matang dan kebijakan terfokus, strategi ini mempersiapkan Indonesia untuk berperan lebih signifikan dalam dinamika geopolitik global (Akbarani & Reviani, 2024; Herindra, 2022).

### **Integrasi Kebijakan Domestik dan Kerja Sama Internasional**

Indonesia menghadapi tantangan dalam memperkuat kapasitas pertahanan di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah. Strategi ini menyeimbangkan kebijakan domestik dengan kerja sama internasional melalui inisiatif seperti Minimum Essential Force (MEF), proyek KFX/IFX, dan pengalaman dari embargo senjata AS. MEF memprioritaskan pengembangan industri pertahanan domestik, dengan perusahaan seperti PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad memainkan peran kunci, meskipun masih menghadapi keterbatasan teknologi dan riset (Satria & Yunanto, 2019).

Kerja sama internasional, seperti proyek KFX/IFX dengan Korea Selatan, menjadi peluang untuk mendapatkan teknologi canggih dan transfer pengetahuan. Kemitraan ini memperkuat posisi tawar Indonesia secara global, tetapi ketergantungan berlebihan pada negara lain tetap menjadi risiko. Diplomasi pertahanan diperlukan untuk memastikan hasil kerja sama yang saling menguntungkan (Lubis, 2022).

Ke depan, Indonesia perlu memperkuat kemampuan domestik sekaligus menjaga kemitraan strategis dengan negara lain. Keseimbangan antara kedua pendekatan ini penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan nasional dalam jangka panjang (Jatmiko, 2023).

### **Implikasi terhadap Keamanan Nasional Indonesia**

Keamanan nasional Indonesia menghadapi tantangan kompleks dari ancaman militer tradisional hingga non-tradisional. Strategi keamanan holistik yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, politik, dan militer diperlukan untuk memperkuat ketahanan nasional. Strategi ini harus mengintegrasikan stabilitas ekonomi, kohesi sosial, dan kesiapan militer dengan

diplomasi pertahanan guna meningkatkan kemampuan domestik tanpa mengorbankan otonomi strategis (Larosa, 2019).

Diplomasi pertahanan memainkan peran kunci dalam memperkuat kapasitas pertahanan melalui kemitraan strategis yang mendukung pengembangan teknologi dan transfer pengetahuan. Kolaborasi internasional juga memberikan akses pada teknologi dan informasi untuk memperkuat industri pertahanan domestik serta menghadapi tantangan tradisional seperti modernisasi alutsista. (Ferisetiadi et al., 2022; Manullang et al., 2022).

Stabilitas sosial juga krusial untuk keamanan nasional. Ketegangan sosial dan ketidaksetaraan dapat memicu konflik internal, sehingga kebijakan sosial yang inklusif menjadi penting untuk mencegah perpecahan dan menjaga stabilitas internal (Asmoro et al., 2022b; Puspitasari & Triadi, 2023).

Dengan anggaran yang terbatas, efisiensi alokasi sumber daya menjadi prioritas. Pengembangan industri pertahanan domestik diperlukan untuk meminimalkan ketergantungan pada impor dan menjaga otonomi strategis. Sementara kerja sama internasional penting, Indonesia harus tetap berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada mitra luar negeri, menjaga keseimbangan antara kemandirian dan kolaborasi internasional (Kennedy, 2017).

## **Solusi Optimal bagi Indonesia**

### **1. Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi kebijakan untuk Indonesia dapat dipertimbangkan:

- Penguatan diplomasi pertahanan dengan membangun kerja sama internasional untuk memperoleh transfer teknologi canggih sambil menjaga otonomi strategis. Diplomasi pertahanan dapat menciptakan hubungan saling menguntungkan tanpa mengorbankan kemandirian nasional (Ardi et al., 2022; Martauli et al., 2015).
- Peningkatan investasi dalam pengembangan industri pertahanan domestik dengan mempercepat pengembangan sektor industri melalui investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) serta kemitraan dengan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor (Ardi et al., 2022; *BRIN Serahkan Naskah Kebijakan Kepada Kemhan Tentang Kerangka Strategi Pertahanan Indonesia 25 Tahun Ke Depan*, 2023).
- Fokus pada kemandirian teknologi dengan meningkatkan kapasitas teknologi domestik melalui keterlibatan sektor swasta dalam riset dan inovasi, serta membangun ekosistem teknologi pertahanan yang kuat (Harti, 2024).

- Mengadopsi kebijakan yang menggabungkan globalisasi untuk teknologi non-kritis dengan pengembangan kapasitas domestik untuk sistem strategis. Pendekatan ini memastikan efisiensi globalisasi sambil memperkuat kemandirian (*BRIN Serahkan Naskah Kebijakan Kepada Kemhan Tentang Kerangka Strategi Pertahanan Indonesia 25 Tahun Ke Depan*, 2023; Hedhianto, 2024).

Indonesia lebih cocok mengadopsi pendekatan hibrida dengan memanfaatkan globalisasi untuk teknologi non-kritis, seperti transfer teknologi dalam proyek KFX/IFX, sambil mengembangkan kapasitas domestik untuk alutsista strategis melalui kebijakan seperti Minimum Essential Force (MEF). Investasi dalam R&D dan kolaborasi dengan mitra strategis akan memperkuat kemandirian industri pertahanan domestik sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor senjata.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketegangan antara globalisasi dan autarki di pasar pertahanan berdampak signifikan terhadap ketahanan nasional Indonesia. Globalisasi memberikan akses teknologi dan peluang kerja sama internasional, tetapi ketergantungan berlebihan pada negara mitra dapat mengancam kemandirian strategis.

Pendekatan hibrida menjadi solusi optimal, memadukan keunggulan globalisasi dengan penguatan kapasitas domestik. Dengan kerja sama internasional untuk akses teknologi dan kemandirian dalam bidang strategis, Indonesia dapat memastikan ketahanan nasionalnya di tengah tantangan globalisasi yang semakin kompleks.

## DAFTAR REFERENSI

- Akbarani, I., & Reviani, A. L. (2024). Indonesian military defence strategy Universitas Widyatama. *Journal of Student Collaboration Research*, 1(1), 17–29. <https://myjournal.or.id/index.php/JSCR>
- Ali, A. H. (2024, November 26). Diversifikasi sumber senjata versus potensi risiko teknis dan keuangan. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20241126101805-14-591150/diversifikasi-sumber-senjata-versus-potensi-risiko-teknis-dan-keuangan>
- Andalus, M. K., & Djuyandi, Y. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengadaan alutsista RI dalam kerangka kebijakan Minimum Essential Force (MEF) pada tahun 2020–2024. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1(3), 175. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44009>
- Ardi, A. A. Z. H., Siahaan, T., & Jandhana, I. P. (2022). Kebijakan publik pertahanan negara Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 81–87. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.40>

- Asmoro, N., Marsetio, M., Zuhdi, S., Putro, R. W., & Putri, R. (2022a). Management of national security in analysis and threat assessment of Indonesian sovereignty. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(4), 1038. <https://doi.org/10.29210/020221705>
- Asmoro, N., Marsetio, M., Zuhdi, S., Putro, R. W., & Putri, R. (2022b). Management of national security in analysis and threat assessment of Indonesian sovereignty. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(4), 1038. <https://doi.org/10.29210/020221705>
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2023, January 11). BRIN serahkan naskah kebijakan kepada Kemhan tentang kerangka strategi pertahanan Indonesia 25 tahun ke depan. <https://brin.go.id/news/111248/brin-serahkan-naskah-kebijakan-kepada-kemhan-tentang-kerangka-strategi-pertahanan-indonesia-25-tahun-ke-depan>
- CNN Indonesia. (2024, January 16). RI komitmen lanjut kerja sama proyek jet tempur KF-21 dengan Korsel. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240116010003-113-1049946/ri-komitmen-lanjut-kerja-sama-proyek-jet-tempur-kf-21-dengan-korsel>
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping defence diplomacy: New roles for military cooperation and assistance*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions* (2nd ed.). SAGE.
- Ezeja, I. I. (2024). Globalization and national security: Unraveling the multifaceted nexus. *IDOSR Journal of Arts and Management*, 9(1), 18–21. <https://doi.org/10.59298/IDOSRJAM/2024/9.1.182189>
- Ferisetiadi, P., Bainus, A., & Herdiansyah, A. G. (2022). Penguatan diplomasi pertahanan Indonesia melalui latihan bersama TNI Angkatan Udara. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1(1), 56. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i1.38867>
- Harti, T. S. (2024, July 11). Upaya strategis membangun sistem sinergitas dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kementerian Pertahanan RI. <https://www.kemhan.go.id/pothan/2024/07/11/upaya-strategis-membangun-sistem-sinergitas-dalam-pengelolaan-sumber-daya-nasional-untuk-pertahanan-negara.html>
- Hedhianto, A. T. (2024). Diplomasi pertahanan Indonesia terhadap New Zealand untuk mengatasi isu internasionalisasi Papua di dunia. *Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2855>
- Herindra, M. (2022, June 20). Establishing Indonesia's defense posture amid global race. *The Jakarta Post*.
- Holsti, K. J. (1991). *Peace and war: Armed conflicts and international order 1648–1989*. Cambridge University Press.
- Inkiriwang, F. W. (2020). The dynamic of the US-Indonesia defence relations: The “IMET Ban” period. <https://orcid.org/0000-0003-2258-4054>

- Ismail, F., & Priyanto. (2023). Optimization of the total defense system in facing national securities challenges to defend state sovereignty. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(6), 49–54. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2023.3.6.499>
- Jatmiko, B. (2023). Indonesia's defense policy in the great power competition era. *Nasionalism dan Integritas*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.3317>
- Kantor Staf Presiden. (2024, January 15). Kerja sama pengembangan jet tempur dengan Korea Selatan, Moeldoko: Jangan poco poco. <https://ksp.go.id>
- Karim, M. H., Halkis, M., Kertopati, S. N., Muhammad, N., & Karim, H. (2023). The implications of legal uncertainty of the provisions on hybrid threats in the Indonesia national defense system. *West Science Law and Human Rights*, 1(4).
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2023). Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis (Vol. XV, No. 24/II/PUSAKA). Dikutip oleh Aulia Fitri.
- Kennedy, P. S. J. (2017). Indonesian national defense and economic challenges and the policies needed. *Fundamental Management Journal*, 2.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and interdependence* (4th ed.). Longman.
- Kim, F. (2023, August 24). Indonesia, South Korea mark milestone with deeper defense collaboration. *Indo-Pacific Defense Forum*.
- Kurç, Ç. (2017). Between defence autarky and dependency: The dynamics of Turkish defence industrialization. *Defence Studies*, 17(3), 260–281. <https://doi.org/10.1080/14702436.2017.1350107>
- Larosa, T. (2019). Redefining Indonesia's national security in ensuring the survival of the nation. *Jurnal Pertahanan*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.33172/jp.v5i1.495>
- Lubis, A. (2022). The strategy of defence diplomacy in achieving national interests and maintaining the sovereignty of the Republic of Indonesia. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(4). <https://doi.org/10.31014/aior.1996.01.04.39>
- Maculewicz, Ł. (2018). Main directions of development in the defence industry sector in the aspect of globalization. *Defence Review*, 8.
- Manullang, G. H., Fauzi, M., & Rachman, A. (2022). Diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman dari Five Power Defence Arrangement (FPDA). *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.
- Manurung, Y., Maarif, S., Toruan, T. S. L., & Swastanto, Y. (2023). Indonesian national defense strategy in the ASEAN region of the 21st century based on defense system and security population demography. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8(2), 936–945.
- Martauli, S., Perencanaan, B., Pembangunan, D., & Makassar, D. S. (2015). Peran diplomasi sebagai cara meningkatkan pengakuan internasional terhadap posisi suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri. *Jurnal Good Governance*, 11(1).

- Maye, D. L. (2017). Autarky or interdependence: U.S. vs. European security and defense industries in a globalized market. *Journal of Strategic Security*, 10(2). <https://doi.org/10.5038/1944-0472.10.2.1597>
- Military embargo on Indonesia no longer in force: US official. (2018, May 16). Antara News.
- Morrissey, S. (2006). U.S. lifts Indonesia arms embargo. Arms Control Association.
- Nugraha, R. A., Sulistyadi, E., & Suseto, B. (2024). Empowering Indonesia's defense: The evolution of smart military society in the total people's war system. *Policy and Maritime Review*, 3.
- Nugroho, S. S. (2021). Learning from past policy: Assessing United States foreign policy over Indonesia in resolving the 1999 East Timor crisis. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.7454/global.v23i1.579>
- Pattisina, E. C. (2024). Kemenhan RI berhasil negosiasi pesawat tempur KFX. Kompas.id.
- Pramudyani, Y. D. (2023, October 27). Indonesia tetap berkomitmen lanjutkan kerja sama KFX/IFX dengan Korea. Antara News.
- PT PAL Indonesia. (2022). MEF Phase III based marine alutsista modernization policy. <https://www.pal.co.id/policy-modernization-alutsista-sea-based-mef-phase-iii/>
- Purwanto, Y. (2022). Kerja sama internasional Indonesia dengan Korea Selatan dalam pembuatan pesawat tempur KFX/IFX. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 4.
- Puspitasari, I., & Triadi, I. (2023). Keamanan dan pertahanan dari aspek sistem keamanan nasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Putra, T., Rasyid, A., & Mahendra Wiswayana, W. (2023). Upaya kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat dalam mencapai target Minimum Essential Force pertahanan negara tahun 2020–2021. *Jurnal Kemlu*.
- Ramadhan Sabana, D., Maharani, I., Gindarsah, C., & Svenska Kendra, S. (2023). Tren pasar senjata global dan pengembangan industri pertahanan Indonesia. *Jurnal Industri Pertahanan*.
- Ramadhoni, M. B. E., Siahaan, T., Khaerudin, & Jandhana, I. B. P. (2024). The impact of war on the global economy: Challenges and opportunities for the Indonesian defense industry. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 4(7), 908–918. <https://doi.org/10.55927/mudima.v4i7.9752>
- RI komitmen lanjut kerja sama proyek jet tempur KF-21 dengan Korsel. (2024, January 16). CNN Indonesia.
- Satria, Y., & Yunanto, S. (2019). Diplomasi kerja sama Indonesia-Korea Selatan dalam pengadaan alutsista (2019–2022). *Humanus: Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 1, 485–501.

SIPRI Arms Transfers Database. (n.d.). Trade register: 1980–2020.  
<https://www.sipri.org/databases/armstransfers>

U.S. lifts arms embargo against Indonesia. (2005, November 23). NBC News.  
<https://www.nbcnews.com/id/wbna10168487>